

SATU DEKADE INVESTIGASI INTERLOCKING DIRECTORATE: SEBUAH MODEL DETEKSI PRAKTIK MONOPOLI?

Nurmala Ahmar
Diyah Pujiati
Joicenda Nahumury

STIE Perbanas Surabaya, Jl. Nginden Semolo No. 34-36, Jangkungan,
Nginden Jangkungan, Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118, Indonesia
Surel: nurmala@perbanas.ac.id

<http://dx.doi.org/DOI: 10.18202/jamal.2016.12.7031>



Jurnal Akuntansi Multiparadigma
JAMAL
Volume 7
Nomor 3
Halaman 443-452
Malang, Desember 2016
ISSN 2086-7603
e-ISSN 2089-5879

Tanggal Masuk:
27 Agustus 2016
Tanggal Revisi:
05 November 2016
Tanggal Diterima:
30 Desember 2016

Abstrak: Satu Dekade Investigasi Interlocking Directorate: Sebuah Model Deteksi Praktik Monopoli? Artikel ini bertujuan untuk menginvestigasi interaksi antar perusahaan melalui jaringan dewan direksi dan komisaris. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan interlock directorate. Kami menginvestigasi rangkap jabatan selama lebih dari 10 tahun. Selain itu, akses mengenai informasi interlock directorate bersumber dari www.interlockdirectorate.com. Hasil penelitian menunjukkan terdapat rangkap jabatan dalam kurun waktu dua hingga tujuh tahun. Lebih dari 49% dewan direksi dan komisaris perusahaan publik di Indonesia melakukan rangkap jabatan. Informasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan untuk deteksi awal praktik monopoli di Indonesia.

Abstract: A Decade of Investigation Interlocking Directorate: A Model of Monopolistic Practices Detection? This aim of this article is to investigate the interaction between companies through a network of board of directors and commissioners. This research is conducted by the interlock directorate approach. We investigate the double position for more than 10 years. In addition, access about directorate interlock can be accessed in www.interlockdirectorate.com. The result of this research is a dual position in the period of two to seven years. More than 49% of the board of directors and commissioners of public companies in Indonesia do a double position. This information can be used for early detection of monopoly practices in Indonesia.

Kata kunci: *interlocking directorate, monopolistic detection, duality position*

Interlocking directorate terjadi ketika seseorang berafiliasi dengan salah satu organisasi yang juga bersamaan menjadi dewan direksi di organisasi yang lain (Miz-ruchi 1996). Semua aspek yang berhubungan dengan *interlocking* memiliki implikasi penting bagi struktur dan efektivitas fungsi dewan perusahaan. Pada akhirnya dewan perusahaan memiliki peran penting dalam tata kelola perusahaan dan kinerja perusahaan (Hermalin dan Weisbach 2003). Penelitian Phan *et al.* (2003) menyatakan bahwa rendahnya standar tata kelola perusahaan dan lemahnya penegakan hukum yang ada di negara berkembang mengakibatkan krisis serta ketidakmampuan perusahaan pulih dari masa krisis tersebut. *Interlocking directorate* dapat menjadi pendekatan utama banyak perusahaan untuk mencegah ketidakpastian lingkungan (Au *et al.* 2000).

Interlocking directorate ditengarai dapat membuka peluang pelanggaran undang-undang anti monopoli. Hal ini dibuktikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Lembaga ini memutuskan bahwa ada pelanggaran Pasal 26 UU Antimonopoli pada kasus No.1/KPPU/L/2003 antara PT Garuda dan PT Abacus. KPPU menemukan *interlocking directorates* oleh dua direksi PT Garuda yang juga memiliki posisi sebagai dewan direksi di PT Abacus, di mana kedua perusahaan tersebut berafiliasi induk dengan anak (hubungan vertikal). PT Garuda adalah penyedia jasa transportasi udara dan PT Abacus adalah penyedia sistem reservasi terkomputerisasi. CSR (*computerized reservation system*) adalah sistem reservasi atau persediaan kursi data yang terhubung secara *online* dengan sistem pemesanan penerbangan. Hubungan vertikal antara PT

Garuda dan PT Abacus merupakan hubungan kerja yang terikat secara eksklusif dengan adanya kebijakan bahwa CRS Abacus merupakan satu-satunya sistem reservasi PT Garuda. Kerja sama eksklusif antara dua perusahaan merugikan agen perjalanan lain yang menggunakan CSR selain Abacus (Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2010). Adams dan Mehran (2012) berpendapat bahwa *interlocking directorate* hanya dilarang jika melanggar larangan yang diatur dalam UU Antimonopoli. Penilaian terhadap pelanggaran berdasarkan pada persetujuan dari KPPU. Lembaga inilah yang memutuskan apakah *interlocking directorate* akan menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan menciptakan praktek monopoli. *Interlocking* merupakan situasi di mana orang yang sama menduduki posisi dewan komisaris dan atau dewan direksi (*boards*) lebih dari satu perusahaan (De 2003). Penelitian Donato dan Tiscini (2009) menemukan bahwa *interlocking directorate* merupakan salah satu cara yang dapat membantu mengurangi asimetri informasi (Mariolis 1975). Fungsinya adalah untuk memantau debitur dengan menawarkan akses ke informasi internal. Adapun teori *interlocking directorates* ditemukan berdasarkan penelitian Phan *et al.* (2003), yaitu *Interlocking directorates for class integration* (kelas penggabungan) dan *Interlocking directorates to reduce uncertainty*.

Interlocking directorates for class integration (kelas penggabungan) didefinisikan sebagai perlindungan timbal balik antara kepentingan kelas social dengan anggotanya (Andre *et al.* 2012, Gonzalez-Bailon *et al.* 2012, Adams dan Mehran 2012). Proses ini didorong oleh identifikasi dan pengangkatan calon direksi dengan latar belakang, karakteristik, dan keyakinan politik yang sama dari dalam jaringan pribadi anggota dewan sebelumnya yang pernah/sedang menjabat. Kedua, *interlocking directorates to reduce uncertainty* merupakan *interlock* yang memungkinkan perusahaan untuk mengurangi ketidakpastian namun meminimalkan resiko ketergantungan, seperti perampokan, dengan mengkooptasi organisasi partner di tingkat dewan (Chang-chong *et al.* 2006). Mahdi *et al.* (2011) mengidentifikasi empat model tertentu yang dapat menjelaskan bagaimana pengaruh *interlocking* terhadap kinerja perusahaan, yaitu (1) *The management control model*, merendahkan atau mengabaikan peran *interlocks board* dan struktur dewan lain dan menekankan bahwa manajer mengambil keputusan yang paling penting

dan dengan demikian tidak terpengaruh oleh pendapat dewan. (2) *The reciprocity model* (timbal balik), berfungsi ketika dua atau lebih perusahaan bekerja sama dalam masalah yang menjadi kepentingan bersama dengan *interlocking directorate* menjadi salah satu cara di mana model ini ditimbulkan. (3) *The finance control model*, para pendukung model ini bertentangan dengan Berle and Means (1932) dengan paradigma perusahaan independen yang lebih bergantung pada kapasitasnya sendiri untuk tumbuh dan berkembang, perusahaan tergantung pada jaringan padat/rapat dari hubungan *intercorporate*, terutama dengan lembaga keuangan mereka yang merupakan penyedia utama keuangan. (4) *The class hegemony model, interlocking directorate* yang lebih mengupayakan/menjamin untuk memastikan kooptasi dan kerjasama antar-organisasi yang elit (Patrick 1974) dari apapun sehingga “melekat secara sosial (*socially embedded*)”. Hasil dari “*class hegemony*” adalah sebuah kelas elit dari direksi yang berinteraksi utama di ruang rapat untuk melayani tujuan melindungi kesejahteraan individu kelas atas (Andre *et al.* 2012, Gonzalez-Bailon *et al.* 2012, Adams dan Mehran 2012).

Beberapa penelitian mengungkap pengaruh *interlocking directorate* terhadap kinerja perusahaan. Sanches dan Barroso-Castro (2015) meneliti tentang pengaruh *interlocking board* dan *firm performance* untuk 101 perusahaan-perusahaan besar di Belanda dengan menggunakan *new panel database*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *interlocks* memiliki pengaruh negative terhadap kinerja perusahaan, hal ini dikarenakan pengaruh dari *interlocking directors* yang membuat dewan menjadi terlalu sibuk dan karena adanya homogenitas/keseragaman kelas sosial yang cenderung hanya pada masyarakat strata sosial kelas atas. Sementara, penelitian Phan *et al.* (2003) bertujuan untuk mengetahui kegunaan dari *interlocking directorate* antara perusahaan dengan pemerintah di negara berkembang. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif antara *interlock* dan kinerja perusahaan. Hal ini bertentangan dengan teori keagenan yang berpendapat bahwa *interlock* hanya berfungsi untuk manajemen yang berkubu (Braam dan Borghans 2014). Terdapat lima faktor penentu *interlocking directorate* yang ditemukan pada penelitian Dooley (1969), yakni ukuran perusahaan, perluasan pengawasan manajerial, hubung-

an financial perusahaan, hubungan dengan kompetitor dan eksistensi pada kepentingan ekonomi. Ada dua alasan utama lain terkait *interlocking*, yakni motif pertukaran informasi (*the information exchange motive*) dan motif control (*control motive*). Motif pertukaran informasi mengacu pada berbagi informasi penting yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan baru, rahasia dagang dan praktek antara pihak perusahaan dalam *interlock* yang bisa mengarah pada kinerja yang lebih baik. Motif kontrol menunjuk pada keberadaan *interlocks* sebagai perangkat pengendali (De 2003).

Pertimbangan alasan eksplisit dalam pembentukan *interlocks* yang telah ditetapkan meliputi kolusi, kooptasi dan pemantauan, legitimasi, kemajuan karir, dan kohesi sosial. Setiap faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya *interlocking directorate* memiliki berbagai konsekuensi. Sebagai mekanisme *collusive*, *interlocks* diasumsikan untuk memfasilitasi komunikasi para kompetitor. Sebagai mekanisme *cooptation*, *interlocks* diasumsikan untuk mengamankan sumber daya penyedia manajemen. Sebagai mekanisme *monitoring* diasumsikan dapat memonitoring perusahaan dengan informasi yang diterima selama pengoperasian perusahaan serta pengaruh potensial pada pengoperasian tersebut. Sebagai refleksi kohesi sosial, *interlocks* diasumsikan untuk memfasilitasi kesatuan politis dalam kegiatan politik secara efektif.

Penelitian ini berupaya menciptakan model deteksi praktik monopoli yang didasarkan pada *interlocking directorates* pada jabatan dewan direktur. Riset sebelumnya dilakukan oleh Ahmar (2013) yang melakukan investigasi *interlocking directorates* berdasarkan jabatan dewan direksi. Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan sekaligus pelengkap diciptakannya model deteksi praktik monopoli didasarkan pada *interlocking* jabatan dewan direksi.

METODE

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Ahmar (2013) terkait model *interlocking directorate* berbasis dewan direksi. Penelitian Ahmar (2013) menghasilkan deteksi rangkap jabatan berbasis dewan direksi. Penelitian ini berfokus pada penyusunan model deteksi praktik monopoli yang didasarkan pada rangkap jabatan dewan direksi pada perusahaan publik di Indonesia dengan melihat status *interlocking* perusa-

haan publik. Status ditentukan berdasarkan kesamaan nama dewan direksi antar perusahaan publik. Jika ada kesamaan nama maka status perusahaan tersebut adalah *interlock*. Perusahaan yang berstatus *interlock* dapat dideteksi apakah melakukan monopoli ataukah tidak berdasarkan usahanya. Status ini merupakan deteksi awal sebagai data pendukung atau bukti adanya rangkap jabatan yang dilarang berdasarkan Peraturan KPPU No.07 tahun 2009. Status *interlock* tersebut dapat dijadikan dasar bagi KPPU untuk melakukan investigasi lebih lanjut berdasarkan kriteria lain untuk mendeteksi adanya praktik monopoli. Data penelitian ini berasal dari publikasi dalam bentuk daftar nama dewan direksi dan dewan komisaris tiap perusahaan yang tersedia pada laporan tahunan, ringkasan kinerja perusahaan tercatat atau pada laporan keuangan tahunan selama tahun 2000 hingga 2010 pada idx.co.id.

Analisis data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut: (1) Mentabulasi status *Interlocking Directorate* di perusahaan j pada tahun t berdasarkan nama-nama dewan direksi yang telah ditabulasi per tahun, apabila terdapat nama yang sama menjabat sebagai dewan direksi di dua atau lebih perusahaan yang berbeda maka nama-nama tersebut mewakili perusahaan yang termasuk *Interlocking Directorate*. (2) Analisis statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Carbonai dan Di-Bartolommeo 2009). Statistik deskriptif memberikan deskripsi suatu data antara lain yang dilihat dari nilai rata-rata (*mean*) (Simoni dan Caiazza 2012). (3) Medeskripsikan dengan gambar, hubungan dewan direksi antar perusahaan dengan menggunakan bantuan *software* NodeXL. Hubungan tersebut digambar berdasarkan perusahaan. (4) Berdasarkan gambar jaringan hubungan tersebut dilakukan analisis perusahaan dan sektor industrinya.

Hasil ini diharapkan dapat memberikan temuan tentang keterkaitan antar perusahaan dari sisi kesamaan dewan direksi dan hubungan antar sektor industri. Status ini merupakan deteksi awal praktik monopoli sebagai data pendukung/bukti adanya jabatan rangkap yang dilarang oleh Peraturan KPPU No.07 tahun 2009. Status *interlock* tersebut dapat dijadikan dasar bagi KPPU untuk melakukan investigasi lebih

lanjut berdasarkan kriteria lain untuk praktik monopoli yang ditetapkan oleh KPPU. Nilai rata-rata skor *interlock*, diuji dengan bantuan software SPSS. Hasil ini untuk menunjukkan gambaran perkembangan *interlock* dari tahun ke tahun selama kurun waktu observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil utama penelitian ini adalah database status *interlock* antar emiten di Bursa Efek Indonesia. *Interlock* didasarkan pada perangkapan jabatan sebagai dewan komisaris dan dewan direksi. Pada tahap awal peneliti melakukan tabulasi data dewan komisaris dan dewan direksi yang menghasilkan database berbasis Ms.Excel. Ditemukan 15.545 nama dewan komisaris dan 16.659 nama dewan direksi selama tahun 2000 sampai dengan 2010.

Investigasi terkait status perangkapan jabatan dilakukan dengan teknik analisis jaringan dengan bantuan aplikasi NodeXL. Hal penting yang menjadi syarat agar akurasi jaringan valid adalah nama yang ditabulasi harus identik. Pemeriksaan konsistensi nama-nama dewan komisaris dan dewan direksi dilakukan dengan mencocokkannya melalui berbagi sumber. Sumber-sumber yang digunakan yaitu ringkasan kinerja perusahaan yang diterbitkan idx.co.id, laporan tahunan (*annual report*), dan laman perusahaan.

Peneliti bekerja sama dengan pengembang website (*web developer*) yang bekerja untuk Bursa Efek Indonesia dalam pengembangan desain *website database* ini. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dalam jangka panjang, laman ini mampu memberikan informasi sebagaimana informasi yang disediakan oleh Bursa Efek Indonesia di laman idx.co.id. Alamat web hasil riset dapat diakses di www.interlockdirector.com. Laman *database* difungsikan sebagai media pencari informasi tentang status *interlock* seluruh emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Secara detail, informasi yang dapat diperoleh dari laman interlockdirector.com adalah sebagai berikut: (1) Nama dewan komisaris per emiten dan status *interlock*nya. (2) Nama dewan direksi per emiten dan status *interlock*nya. (3) Status *interlock* per emiten berdasarkan dewan komisaris. (4) Status *interlock* emiten berdasarkan dewan direksi. (5) Nama emiten dengan status *interlock*. (6) Skor *interlock* per tahun untuk masing-masing emiten berdasarkan rangkap jabatan dewan komisaris.

(7) Skor *interlock* per tahun untuk masing-masing emiten berdasarkan rangkap jabatan dewan komisaris. (8) Informasi jumlah perangkapan yang melekat pada dewan komisaris. (8) Informasi jumlah perangkapan yang melekat pada dewan direksi.

Penelitian untuk melakukan identifikasi terhadap status perangkapan ini membutuhkan waktu yang lama. Keberadaan database ini diharapkan dapat membantu para peneliti melakukan riset yang terkait dengan *interlocking directorate* di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi *prototype* untuk menciptakan database sejenis untuk seluruh perusahaan yang terdaftar di kementerian hukum dan hak azasi manusia (Kumham) sehingga deteksi kepemilikan perusahaan dan posisi dewan komisaris dapat diperoleh dengan mudah. Pada penelitian ini desain database dibuat dinamis, sehingga ketika ada pembaharuan data maka informasi yang ditampilkan berubah. Desain program untuk hal tersebut sepenuhnya dilakukan oleh *web-developer* dengan bahasa program ahli teknologi informasi. Peneliti menyediakan logika dan sajian datanya. Pengecekan kebenaran dilakukan dengan membandingkan hasil jaringan dari NodeXL dibandingkan dengan hasil program yang dibuat oleh *web developer*.

Rangkap jabatan dewan komisaris pada penelitian ini tidak dibedakan antara dewan komisaris independen dan bukan independen. Berdasarkan hasil analisis rangkap jabatan dewan komisaris selama 2000-2010 terungkap adanya perangkapan jabatan pada 2 sampai dengan 7 emiten. Dewan komisaris yang merangkap jabatan pada 2 emitem selama kurun waktu tersebut cenderung naik, tahun 2000 tercatat 80 orang dan tahun 2010 terdokumentasi sejumlah 125 orang. Demikian juga dengan rangkap jabatan untuk 3 emiten sekaligus. Rangkap jabatan 7 mulai ada pada tahun 2010. Personal dan emiten tempat menjabat sebagai dewan komisaris dapat dicari melalui laman web luaran penelitian ini (www.interlockdirector.com) melalui menu "Pencarian *Interlock*" dan menuliskan nama pada isian nama dewan komisaris dan direksi, Tabel 1 menunjukkan rangkuman jumlah dewan komisaris yang berstatus *interlock* (rangkap jabatan) per tahun mulai dari rangkap 2 sampai dengan rangkap 7.

Investigasi lebih lanjut dapat dilakukan untuk mengetahui nama-nama dewan komisaris yang merangkap pada masing-

Table 1. Interlocking Directorate 2000-2010 Berbasis Dewan Komisaris

Tahun	Jumlah <i>Interlock</i> *)						Jumlah
	2	3	4	5	6	7	
2000	80	16	8	1	1	-	106
2001	80	15	10	1	1	-	107
2002	74	15	7	2	-	-	98
2003	82	17	5	2	-	-	106
2004	81	16	6	2	-	-	105
2005	102	18	4	1	-	-	125
2006	97	19	3	2	-	-	121
2007	119	23	4	1	1	-	148
2008	118	25	3	4	-	-	150
2009	113	25	5	2	2	-	147
2010	125	24	7	3	1	1	161

masing posisi. Tabel 2 menunjukkan daftar nama-nama dewan komisaris dan nama perusahaan (emiten) dimana nama yang bersangkutan menjabat sebagai dewan komisaris.

Pada sebagian besar penelitian, *interlocking directorate* diukur dengan membandingkan jumlah dewan komisaris yang merangkap dengan jumlah total dewan. Hasil tersebut merupakan skor status *interlock* (Mazzola *et al.* 2015, Aduda *et al.* 2013, Kim dan You 2013, Saidin *et al.* 2013, Li *et al.* 2012, Di *et al.* 2015). Tabel 2 menunjukkan

bahwa rata-rata jumlah emiten yang berstatus *interlock* berbasis dewan komisaris adalah 49.7% dari jumlah emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada kecenderungan peningkatan jumlah emiten yang berstatus *interlock*. Rata-rata skor *interlock* adalah 0.443 atau hamper separu emiten yang berstatus in terlock, dewan komisais yang duduk pada masing-masing emiten hamper setengahnya merangkap jabatan pada perusahaan lain.

Struktur perusahaan pada umumnya merupakan hubungan pertanggungjawaban

Table 2. Rata-rata skor *Interlock* Tahun 2000-2010 Berbasis Dewan Komisaris

Tahun	Rata-rata Skor	Jumlah Emiten	Jumlah Perush Listing	Persentase Emiten <i>Interlock</i>
2000	0.492	141	278	51%
2001	0.455	145	296	49%
2002	0.469	129	302	43%
2003	0.431	145	309	47%
2004	0.422	153	311	49%
2005	0.432	165	325	51%
2006	0.410	167	333	50%
2007	0.435	186	362	51%
2008	0.442	197	389	51%
2009	0.443	205	399	51%
2010	0.445	227	425	53%
Rata-rata	0.443	-	-	49,7%

Table 3. Interlocking Directorate 2000-2010 Berbasis Dewan Direksi

Tahun	Jumlah <i>Interlock</i> *)				Jumlah
	2	3	4	5	
2000	43	7	-	-	50
2001	47	9	1		57
2002	47	3	1		51
2003	45	3	1		49
2004	32	1	1		34
2005	43	2	-	-	45
2006	45	-	-	1	46
2007	47	7	-	1	55
2008	48	6	-	1	55
2009	47	8	1	-	56
2010	62	8	-	-	70

dan pembagian peran di antara berbagai organ utama perusahaan seperti pemegang saham, komisaris, dan direksi. Rangkap jabatan terjadi pula pada posisi dewan direksi. Pada system tata kelola perusahaan dikenal 2 pendekatan system, yaitu *one-tier* dan *two tier* (Bischoff dan Buchwald 2015). Sistem *one-tier* hanya dikenal adanya pimpinan, namun tidak ada fungsi pengawasan. Pada system *two-tier* dipisahkan antara pimpinan dan pengawas. Pimpinan masuk pada jajaran dewan direksi, sementara pengawas masuk pada struktur dewan komisaris. Di Indonesia, berdasarkan UU No. 1 tahun 1995, terdapat peraturan bahwa komisaris dan direksi jelas wajib dipisahkan. Penelitian ini melakukan investigasi pula terkait perangkapan pada jabatan/struktur dewan direksi. Tabel 3 menunjukkan rangkuman *interlocking directorate* berdasarkan dewan direksi.

Berdasarkan tabel tersebut ditemukan bukti bahwa terdapat cukup banyak nama dewan direksi yang merangkap jabatan sebagai direksi di perusahaan lain. Jumlah perangkapan mulai tahun 2000 sampai dengan 2010 ada kecenderungan meningkat. Tercatat tahun 200 sejumlah 50 dewan direksi merangkap dan tahun 2010 sejumlah 70 nama dewan direksi merangkap pada perusahaan lain yang *listing* di BEI. Perangkapan jabatan sebagai dewan direksi mencakup rangkap 2 sampai dengan rangkap 5. Rangkap jabatan pada posisi dewan komisaris mayoritas adalah rangkap 2. Berbeda dengan rangkap jabatan sebagai dewan komisaris yang didominasi 2 dan 3 perusahaan.

Rangkap jabatan pada dasarnya mendominasi kondisi status *interlock directorate* di Indonesia. Menilik jumlah dewan direksi yang rangkap jabatan dari tahun ke tahun jumlah dewan direksi yang rangkap jabatan konsisten jumlahnya. Kondisi ini dapat diduga ada indikasi bahwa dewan direksi yang rangkap jabatan dimungkinkan dari tahun merupakan personal yang sama. Kondisi tahun 2010 justru ada peningkatan yang cukup signifikan secara absolut karena terdapat pertumbuhan jumlah emiten yang berstatus sebesar 25%. Penguasaan sektor bisnis dan ekonomi besar ditengarai dikendalikan oleh orang-orang tertentu. Kondisi ini didukung oleh status *interlock* rangkap 3 yang terinvestigasi cukup banyak. Hal yang sama ditemukan pada status *interlock* berbasis dewan direksi. Tahun terakhir investigasi menunjukkan peningkatan jumlah emiten yang memiliki dewan komisaris rangkap jabatan. Mengkaji hasil investigasi yang secara konsisten tidak banyak berubah selama 10 tahun lebih, peneliti berpendapat bahwa tidak mudah untuk menghilangkan penguasaan ekonomi oleh pihak-pihak tertentu. Mereka telah lama berkiper di bidang tersebut.

Hasil investigasi menunjukkan bukti bahwa 26,5% dewan direksi emiten di BEI melakukan rangkap jabatan selama tahun 2000-2010. Adapun perbandingan jumlah dewan direksi yang merangkap jabatan dibandingkan dengan total jumlah dewan komisaris secara rata-rata ditemukan sejumlah 40,3% atau 2:5, artinya pada rata-rata lima jabatan direksi di perusahaan, dua

beberapa negara kondisi *interlock* tersebut mempengaruhi kinerja perusahaan (Sanchez dan Barroso-Castro 2015, Adams dan Mehran 2012, Pombo dan Gutierrez 2011, Thorgren *et al.* 2010), nilai perusahaan (Omer *et al.* 2014), kompensasi manajemen (Wong *et al.* 2015), modal privat (Stuart dan Yim 2010), tingkat pengungkapan laporan keuangan (Cai *et al.* 2014). Database ini diharapkan dapat memberikan kontribusi optimum terkait perkembangan riset tentang *interlocking*. Hal ini dikarenakan data kualitatif serta status *interlock* terpublikasi baik oleh institusi pasar modal maupun institusi lain untuk mendeteksi perangkapan jabatan belum ada. Status *interlock* nama jajaran dewan komisaris maupun direksi harus ditelusuri satu per satu. Penelitian ini membutuhkan *software network analysis* dengan NodeXL. Ada beberapa alternatif *software network analysis* untuk riset sosial. Akan lebih baik, penelitian yang akan datang menggunakan software alternatif lain untuk memperkaya teknik menentukan jaringan antar perusahaan berdasarkan kriteria tertentu. Diskusi secara intensif dengan KPPU merupakan tambahan kegiatan berdasarkan perkembangan nilai kemanfaatan hasil penelitian. Kegiatan ini membutuhkan upaya optimum karena peneliti dan sebagian besar akademisi tidak banyak terlibat dalam kegiatan KPPU. Kriteria praktik monopoli tidak hanya didasarkan pada rangkap jabatan dewan komisaris atau direksi, oleh karenanya model *interlock* yang dihasilkan pada riset ini bukan satu-satunya pengukur praktik monopoli.

Beberapa penelitian tentang *Interlocking Directorate* terhadap kinerja perusahaan yang meneliti tentang pengaruh *interlocking board* dan *firm performance* untuk 101 perusahaan-perusahaan besar di Belanda dengan menggunakan *new panel database* (Cai *et al.* 2014). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *interlocks* memiliki pengaruh *negative* terhadap kinerja perusahaan. Penelitian Phan *et al.* (2003) mempunyai tujuan untuk mengetahui kegunaan dari *interlocking directorate* antara perusahaan pada pemerintahan di negara berkembang. Penelitian tersebut menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan positif antara *interlocking directorate* dan kinerja perusahaan. Temuan lain terkait pengaruh status *interlock* dengan kinerja perusahaan juga ditemukan oleh beberapa peneliti (Sanchez dan Barroso-Castro 2015, Kim 2013, Pombo dan Gutierrez 2011, Thorgren *et al.* 2010)

Connelly dan Slyke (2012) mengemukakan bahwa dewan direksi dan komisaris yang berstatus *interlock* dapat menjadi alat yang penting bagi perusahaan untuk mengevaluasi strategi khusus. Salah satu aspek penting dari status *interlock* adalah memungkinkan perusahaan untuk mengamati perilaku perusahaan lain dan mengurangi ketidakpastian terkait dengan inisiatif strategis. Implikasinya, kinerja perusahaan dapat dimonitor dengan baik oleh dewan komisaris.

Interlock Directorate merupakan salah satu indikasi terjadinya praktik monopoli, namun bukan berarti hal tersebut benar-benar terjadi Menurut Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) berpendapat bahwa maraknya praktik kartel di Indonesia diakibatkan oleh hukuman berupa denda yang relatif rendah, hanya dua puluh lima miliar rupiah, sementara keuntungan yang diperoleh dapat mencapai angka triliunan rupiah. Oleh karena itu, peneliti merasa tidak heran jika banyak perusahaan atau pengusaha di Indonesia yang berani melakukan praktik haram ini.

Adapun indikasi praktik monopoli menurut KPPU adalah: (1) Perjanjian yang dilarang yaitu melakukan perjanjian dengan pihak lain untuk secara bersama-sama mengontrol produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat seperti perjanjian penetapan harga, diskriminasi harga, boikot, perjanjian tertutup, oligopoli, *predatory pricing*, pembagian wilayah, kartel, *trust* (persekutuan), dan perjanjian dengan pihak luar negeri yang dapat menyebabkan persaingan usaha tidak sehat. (2) Kegiatan yang dilarang yaitu melakukan kontrol produksi dan/atau pemasaran melalui pengaturan pasokan, pengaturan pasar yang dapat menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. (2) Posisi dominan, pelaku usaha yang menyalahgunakan posisi dominan yang dimilikinya untuk membatasi pasar, menghalangi hak-hak konsumen, atau menghambat bisnis pelaku usaha lain.

Sulitnya deteksi praktik monopoli juga disebabkan karena tindakan terhadap praktik monopoli harus didukung oleh fakta hukum. Benturan antar regulasi juga menjadi penyebab tidak mudahnya memberantas praktik-praktik monopoli. Investigasi selama lebih dari 10 tahun pada perusahaan publik di Indonesia menunjukkan adanya konsis-

tensi hasil status *interlock directorate* 26% berbasis dewan direksi dan 49,7% berbasis dewan komisaris.

SIMPULAN

Pasal 26 UU No. 5 tahun 1999 secara eksplisit menyatakan bahwa rangkap jabatan bukan sesuatu yang dilarang. Meskipun demikian, kondisi tersebut dilarang jika komisaris atau direktur beroperasi pada pasar yang sama, memiliki keterkaitan bisnis, dalam produksi (industri hulu hilir), menguasai pangsa pasar, dan mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. Deteksi terhadap kondisi tersebut tidak mudah dilakukan bila tidak diketahui status *interlocking* pada jabatan dewan komisaris atau direktur. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa diperlukan suatu model analisis yang mampu menyajikan status *interlocking* tersebut.

Hasil investigasi menunjukkan bahwa 49,7% perusahaan publik di Indonesia berstatus *interlock* berbasis dewan komisaris. Hal ini berarti 49,7 perusahaan terindikasi/terdeteksi tidak mematuhi peraturan KPPU mengenai larangan rangkap jabatan.

Banyak aspek dan bukti-bukti yang mendukung secara hukum untuk dapat menentukan adanya praktik monopoli. Hasil penelitian ini diharapkan mampu berkontribusi sebagai *early warning* terkait praktik monopoli di Indonesia. Informasi tentang *interlocking directorate* dapat diakses pada www.interlockdirectorate.com sebagai bahan untuk penelitian berikutnya dan menjadi masukan penting bagi KPPU terkait dengan rangkap jabatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adams, R. B. dan H. Mehran. 2012. "Bank board structure and performance: Evidence for large bank holding companies." *Journal of financial Intermediation*, Vol. 21, No. 2, hlm 243-267.
- Aduda, J., R. Chogii, dan P. O. Magutu. 2013. "an Empirical Test of Competing Corporate Governance Theories on the Performance of Firms Listed At the Nairobi Securities Exchange." *European Scientific Journal*, Vol. 99, No. 1313, hlm 1857-7881.
- Ahmar, N. 2013. "Satu Dekade *Interlocking Directorate* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia." *Working Paper*. STIE Perbanas Surabaya.
- Andre, P., S. Khalil, dan M. Magnan. 2012. "The adoption of deferred share unit plans for outside directors: economic and social determinants." *Journal of Management dan Governance*, Vol. 16, No. 1, hlm 81-105.
- Au, K., M.W. Peng, dan D. Wang. 2000. "Interlocking directorates, firm strategies, and performance in Hongkong: Towards a research agenda." *Asia Pacific Journal of Management*, Vol. 17, hlm 29-47.
- Braam, G., dan L. Borghans. 2014. "Board and auditor *interlocks* and voluntary disclosure in annual reports." *Journal of Financial Reporting and Accounting*, Vol. 12, No. 2, hlm 135-160.
- Cai, Y., D.S. Dhaliwal, Y Kim, dan C. Pan. 2014. "Board *interlocks* and the diffusion of disclosure policy." *Review of Accounting Studies*, Vol. 19, No. 3, hlm 1086-1119.
- Carbonai, D., dan G. Di-Bartolommeo. 2009. "Interlocking Directorates as a Trust Substitute: The Italian Non-Life Insurance Industry." *Proceeding 1st NPR Workshop*. Milan.
- Chang-chong, L., C. Shi-hua, dan J. Schwalbach. 2006. "Theories of Interlocking Directorates: An Empirical Testing Based on Listed Companies of China." *China Industrial Economy*, Vol. 1, hlm 113-119.
- Connelly, B.L. dan E.J.V. Slyke. 2012. "The Power and Peril of Board Interlocks." *Business Horizons*, Vol. 55, No. 5, hlm 403-408. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2012.03.006>.
- De, B. 2003. "The Incidence and Performance Effects of *Interlocking Directorates* in Emerging Market Business Groups: Evidence From India." *Research Paper in Economics*.
- Di, B.G., B. Sapienza, dan P.C. Luiss. 2015. "Interlocking directorates and concentration in the Italian insurance market." *Journal of Industry, Competition and Trade*, Vol. 15, No. 4, hlm 351-362.
- Donato, F. d., dan R. Tiscini. 2009. "Cross Ownership And *Interlocking Directorates* Between Banks And Listed Firms: An Empirical Analysis Of The Effects On Debt Leverage And Cost Of Debt In The Italian Case." *Corporate Ownership of Control*, Vol. 6, No. 3, hlm 473-481.
- Dooley, P. C. 1969. "The *Interlocking Directorate*." *American Economic Association*, Vol. 59, No. 3, hlm 314-323.
- Gonzalez-Bailon, S., W. Jennings, dan M. Lodge. 2012. "Politics in the Board-

- room: Corporate Pay, Network and Recruitment of Former Parliamentarians Minksters and Civil Servant in Britain." *Political Studies*, Vol. 61, No. 4, hlm 850-873,
- Hermalin, B.E. dan M.S. Weisbach. 2003. "Board of Directors as an Endogenously Determined Institution: A Survey of the Economic Literatur." *Economic Policy Review*, Vol. 9, No. 1, hlm 7-26.
- Kim, P. dan J. You. 2013. "A Study on the Effects of Indian Business Group *Interlock* and Size on Firm Performance: Evidence from Bombay Stock Exchange 500." *Journal of Advanced Management Science*, Vol. 1, No. 4, hlm 378-382. <http://doi.org/10.12720/joams.1.4.378-382>.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 2010. Pedoman Pelaksanaan Pasal 50 Huruf D tentang Pengecualian dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap perjanjian dalam Rangka Keagenan.
- Li, W., A. He, H. Lan, dan D. Yiu. 2012. "Political Connections and Corporate Diversification in Emerging Economies: Evidence From China." Vol. 29, No. 3, hlm 799-818 .
- Mahdi, K., A. Almajid, M. Safar, H. Riquelme, dan S. Torabi. 2011. "Social Network Analysis of Kuwait Pbcily-Held Corporation." *Procedia Computer Science*, Vol. 10, hlm 272-281.
- Mazzola, E., G. Perrone, dan D. Samuel. 2015. "The Interaction between Inter Firm and *Interlocking* Directorate Networks on Firm's New Product Development Outcomes." *Journal of Business Research*, Vol. 69, No. 2, hlm 272-281.
- Mizruchi, M. S. 1996. "What do *interlocks* do? an analysis, critique, and assessment of research on *interlocking* directorates." *Annual reviewing of sociology*, Vol. 22, hlm 271-298.
- Nugroho, B. Y., dan U. Eko. 2011. "Board Characteristics and Earning Management." *Bisnis dan Birokrasi Journal*, Vol. 18, No. 1, hlm 1-10.
- Omer, T. C., M.K. Shelley, dan F.M. Tice. 2014. "Do Well-connected Directors Affect Firm Value?" *Journal of Applied Finance*, Vol. 24, No. 2, hlm 17-32.
- Phan, P. H., S.H. Lee, dan S.C. Lau. 2003. "The Performance Impact Of *Interlocking* Directorates: The Case of Singapore." *Journal of Managerial Issues*, Vol. XV, No. 3, 338-352.
- Pombo, C., dan L.H. Gutiérrez. 2011. "Outside directors, board *interlocks* and firm performance: Empirical evidence from Colombian business groups. *Journal of Economics and Business*, Vol. 63, No. 4, hlm 251-277.
- Saidin, N., M. Malek, dan S.F. Saidin. 2013. "The Impact of *Interlocking* Directorates on Corporate Performance of Bursa Malaysia Listed Companies." *Social Sciences dan Humanities*, Vol. 21, hlm 111-126.
- Sánchez, L. P. C., dan C. Barroso-Castro. 2015. "It is Useful to Consider the *Interlocks* According to the Type of Board Member (Executive or Non-Executive) Who Posseses Them? Their Effect on Firm Performance." *Revista Europea de Dirección y Economía de la Empresa*, Vol. 24, No. 3, hlm 130-137.
- Simoni, M., dan R. Caiazza. 2012. "Interlocks Network Structure as Driving Force of Coopetition among Italian Firms." *Corporate Governance*, Vol. 12, No. 3, hlm 319-336.
- Stuart, T. E., dan S. Yim. 2010. "Board Interlocks and the Propensity to be Targeted in Private Equity Transactions." *Journal of Financial Economics*, Vol. 97, No. 1, hlm 174-189.
- Thorgren, S., J. Wincent, dan S. Anokhin. 2010. "The Importance of Compensating Strategic Network Board Members for Network Performance: A Contingency Approach." *British Journal of Management*, Vol. 21, No. 1, hlm 131-151.
- Wong, L. H. H., A.F. Gyax, dan P. Wang. 2015. "Board *Interlocking* Network and the Design of Executive Compensation Packages." *Social Networks*, Vol. 41, hlm 85-100.